

PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL: KONSEP DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM

M. Syukri

(IP FKIP Universitas Tanjungpura, Pontianak)

***Abstrak:** Pendidikan keaksaraan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki daya ungkit bagi pembangunan masyarakat dan berkaitan dengan kemampuan dasar yang sangat bermanfaat untuk berbagai macam aktivitas kehidupan sehari-hari. Bahkan, ide mengenai keaksaraan fungsional pada awalnya bertujuan untuk menjadikan warga belajar buta aksara mampu berfungsi sesuai dengan budayanya sendiri, tetapi sejak konferensi UNESCO di Teheran-Iran tahun 1965, terjadi peralihan pemikiran dan keaksaraan fungsional menjadi lebih dikaitkan dengan ekonomi, yang berarti bahwa tujuan akhir dari keaksaraan adalah untuk membantu pihak penerima (sasaran didik) mampu berfungsi dalam kehidupan ekonomi.*

Kata Kunci: konsep, strategi, keaksaraan fungsional

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, dikemukakan bahwa jalur pendidikan di Indonesia terdiri dari; informal, formal dan non-formal. Di dalam membangun masyarakat ketiga jalur pendidikan ini tidak dapat dipisahkan karena saling memiliki keterkaitan satu sama lain, namun dari masing-masing pendidikan memiliki karakteristik sasaran peserta yang berbeda. Sebagai contoh dalam pendidikan non-formal yang memiliki beraneka ragam jenis pendidikan, yang diantaranya adalah pendidikan keaksaraan fungsional (KF). Jenis pendidikan ini ditujukan bagi masyarakat yang sama sekali belum pernah tersentuh oleh jalur pendidikan formal, atau masyarakat yang sudah pernah menerima pendidikan di jalur formal tetapi telah menjadi buta aksara kembali.

Salah satu program PNF yang terkait erat dengan upaya mengatasi dampak krisis multidimensi adalah pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan secara umum dirancang untuk memberantas ketunaksaraan penduduk dari buta aksara, angka dan bahasa Indonesia serta buta pendidikan atau pengetahuan dasar.

Pada awalnya, ide mengenai keaksaraan fungsional bertujuan untuk menjadikan warga belajar buta aksara mampu berfungsi sesuai dengan budayanya sendiri, tetapi sejak konferensi UNESCO di Teheran-Iran tahun 1965, terjadi peralihan pemikiran dan keaksaraan fungsional menjadi lebih dikaitkan dengan ekonomi (Bhola; 1994:32) yang berarti bahwa tujuan akhir dari keaksaraan adalah untuk membantu pihak penerima (sasaran didik) mampu berfungsi dalam kehidupan ekonomi.

Untuk memberikan pemahaman yang jelas bagi pemerhati pendidikan nonformal terutama pendidikan keaksaraan, dalam topik ini akan dikemukakan konsep keaksaraan, keaksaraan fungsional, dan strategi pengembangan program keaksaraan fungsional, sebagai berikut:

Konsep Pendidikan Keaksaraan

Pendidikan pada dasarnya diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melingkupinya. Dalam konteks pendidikan keaksaraan, berarti bagaimana memberaksarakan penduduk dari kebutaaksaraan agar dapat membaca dunia kehidupannya. Untuk mencapai tujuan itu, kita tidak bisa memulai sebuah program pendidikan keaksaraan tanpa mengetahui filosofi yang berhubungan dengan program tersebut, yakni: Apa filosofi dan tujuan dari keaksaraan?

Dahulu orang yang kita yakini sebagai orang buta aksara, ternyata dapat melakukan hal-hal seperti di atas, baik melalui musik, drama, lagu, adat istiadat, pola pakaian, hikayat, sejarah dan sebagainya. Hal-hal tersebut ternyata pula telah dilakukan dengan pola terstruktur yang membantu mereka mengingat dan berkomunikasi dengan sesamanya, bahkan dengan perbedaan ruang dan waktu sekalipun. Orang yang buta aksara bisa jadi mempunyai pengetahuan yang luas, contoh orang di pedalaman ternyata sudah mempunyai pengetahuan yang kompleks mengenai cara bertanam, memelihara berbagai hewan ternak, membangun rumah dan membuat berbagai macam kerajinan.

Mereka menguasai pendidikan dasar yang diperlukan untuk bertahap hidup, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun.

Pengetahuan keaksaraan ala pendidikan formal tidak terlalu diperlukan oleh mereka yang tinggal di wilayah pedesaan seperti gambaran di atas. Banyak orang bisa bertahan hidup tanpa pendidikan keaksaraan, dan mereka mampu membuat strategi yang efektif untuk menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Saat mereka harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan baca tulis misalnya, mereka meminta bantuan orang lain atau menggunakan jasa para ahli (orang yang sudah melek aksara). Tetapi yang pasti bahwa, kehidupan akan terus berubah dan prospek perubahan ke depan jauh seperti yang dibayangkan. Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinannya di suatu tempat tidak memerlukan pentingnya pendidikan keaksaraan untuk sebuah perubahan. Ke depan kebutuhan baca tulis menjadi penting bahkan untuk mereka yang buta aksara sekalipun.

Beberapa alasan mengapa orang buta aksara perlu belajar keaksaraan antara lain untuk:

- Mendapatkan status dan/atau dihormati oleh orang lain;
- Mempelajari kemampuan/ keterampilan baru yang belum dimiliki;
- Mendapatkan posisi tertentu sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai anggota masyarakat;
- Mempertahankan statusnya semula
- Memulai usaha/bisnis baru;
- Menulis dan membaca surat-surat yang sifatnya resmi;
- Membantu pekerjaan rumah anak

- Mendapatkan informasi berkaitan hal tertentu, seperti tentang pertanian dan kesehatan;
- Membaca aturan pakai berbagai produk barang dan jasa;
- Membaca media cetak;
- Mengetahui label di pestisida dan pupuk;
- Mencatat perkembangan vaksinasi anak;
- Menghindari penjiplakan;
- Mendapatkan pekerjaan;
- Membaca buku keagamaan;
- Memperoleh hiburan.

Masih banyak lagi alasan yang diperlukan untuk belajar keaksaraan. Dalam kenyataan faktor terpenting yang memotivasi mereka belajar keaksaraan sering tidak tampak dalam program pendidikan keaksaraan itu sendiri.

Jika dilihat dari filosofinya, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk membantu manusia mengingat, mencatat, dan berkomunikasi lintas ruang dan waktu. Dengan demikian, pendidikan keaksaraan bukan satu-satunya cara bahkan bukan cara yang terbaik untuk menuntaskan kebutaaksaraan, dan hal-hal yang melingkupinya seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidak-berdayaan penduduk. Satu hal yang pasti bahwa, kebutuhan akan pendidikan keaksaraan semakin meningkat seiring dengan perubahan dan perkembangan dunia.

Street (1995) mengembangkan model “keaksaraan otonom” (*outonomous view of literacy*). Bentuk keaksaraan seperti ini bisanya mengabaikan keaneka-ragaman konteks budaya, dan tidak selalu sesuai dengan budaya lokal dalam suatu

masyarakat. Permasalahan yang muncul dari model keaksaraan otonom adalah bahwa model tersebut mempunyai anggapan yang sempit dan datang dari alam pikiran dunia barat. Atas dasar itu, Street lebih lanjut menyarankan, model “keaksaraan ideologis” yang memandang bahwa model keaksaraan itu tidak hanya satu, tetapi ada banyak model keaksaraan tergantung dari konteks budaya masyarakatnya. Filosofi keaksaraan ideologis ini secara gamblang menaruh perhatian pada bentuk-bentuk keaksaraan dan budaya lokal. Pada intinya filosofi model “keaksaraan ideologis” adalah bahwa pendidikan keaksaraan perlu dipikirkan masak-masak untuk memastikan bahwa program pemberantasan buta aksara harus relevan dan sesuai dengan pandangan hidup dan budaya masyarakatnya.

Berbeda dengan pendapat di atas, yaitu pendapat yang melihat bahwa keaksaraan sebagai sesuatu yang vakum (*vacuum literacy*), dimana “aksara hanya untuk aksara” itu sendiri, dan memandang keaksaraan tidak dicampuradukkan dengan budaya, ekonomi, maupun sejarah. Melalui pandangan keaksaraan sebagai sesuatu yang vakum, maka kegagalan dalam peningkatan keaksaraan penduduk suatu bangsa atau masyarakat, hanya disebabkan oleh faktor teknis yang berkaitan dengan keaksaraan itu sendiri. Para penganutnya melihat demikian penting kedudukan seorang tutor, yang harus berkembang menjadi seorang mentor. Menurut penganut ideologi ini, peran mentor meliputi pembimbing, fasilitasi, pengendali, model, pembantu, penghubung, pencipta peluang

belajar, perangsang dan pemberi inspirasi, penyiram dan pengembang ide/gagasan.

Coombs (1973) mengatakan bahwa pendidikan keaksaraan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki daya ungkit bagi pembangunan masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang. Hunter (1985), mengatakan bahwa kemampuan keaksaraan memiliki keterkaitan dengan kemampuan dasar yang sangat bermanfaat untuk berbagai macam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pendidikan keaksaraan adalah satu cara untuk mengingat, mencatat, mengungkapkan kenyataan serta berkomunikasi lintas ruang dan waktu (Archer & Cottingham, 1996:9).

Menurut John Hunter (1997:124) ada tiga kategori dasar tentang definisi keaksaraan, di mana setiap kategori didasari oleh asumsi yang sangat berbeda dari peran keaksaraan dalam kehidupan masyarakat, yaitu :

1. *Literacy as a set on basic skills, abilities or competencies* (keaksaraan merupakan seperangkat keterampilan dan kompetensi dasar).
2. *Literacy as the necessity foundation for higher quality of life* (keaksaraan sebagai dasar yang penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik).
3. *Literacy as a reflection of political and structural realities* (keaksaraan merupakan refleksi dari kebijakan dan kenyataan struktural).

Konsep Keaksaraan Fungsional

Tidak sedikit para praktisi, pakar dan promotor keaksaraan memusatkan perhatian mereka pada berbagai macam alasan untuk melaksanakan program pendidikan keaksaraan. UNESCO, suatu badan dunia yang menaruh perhatian terhadap masalah pendidikan keaksaraan, memberikan penekanan pada "keaksaraan fungsional". Pada awalnya ide mengenai keaksaraan fungsional bertujuan untuk menjadikan warga belajar buta aksara mampu berfungsi sesuai dengan budayanya sendiri, tetapi sejak konferensi UNESCO di Teheran-Iran tahun 1965, terjadi peralihan pemikiran dan keaksaraan fungsional menjadi lebih dikaitkan dengan ekonomi (Bhola; 1994:32) yang berarti bahwa tujuan akhir dari keaksaraan fungsional adalah untuk membantu pihak penerima (sasaran didik) mampu berfungsi dalam kehidupan ekonomi.

Filosofi keaksaraan fungsional sebagaimana dikemukakan oleh Beynham (1995:1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya keaksaraan termasuk ideologi. Dengan berupa ideologi tentu saja keaksaraan tidak bersifat netral, semuanya tergantung pada keputusan sebagai sesuatu yang tidak netral, maka program pendidikan keaksaraan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi keaksaraan tersebut.

UNESCO mendefinisikan kemampuan keaksaraan atau melek aksara sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kalimat sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dan seseorang dikatakan mempunyai kemampuan keaksaraan fungsional jika seseorang

tersebut dapat terlibat dalam aktivitas dimana kemampuan keaksaraan merupakan prasyarat sebagai effective function kelompok dan sebagai dasar bagi dirinya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya sendiri.

Pada pelaksanaannya, keaksaraan fungsional merupakan penyempurnaan pendekatan bagi program pemberantasan buta aksara yang menitikberatkan pada proses, oleh dan untuk warga belajar dengan strategi pembelajarannya melalui diskusi, membaca, menulis, berhitung dan aksi. Keaksaraan fungsional juga merupakan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar. Oleh karena itu, keaksaraan fungsional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis dan berhitung dengan harapan warga belajar dapat menggunakannya atau berfungsi untuk pemecahan masalah dalam kehidupannya sehari-hari dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keaksaraan fungsional berpusat pada bagaimana cara masyarakat menggunakan keterampilan keaksaraannya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak hanya membaca informasi tetapi menerapkannya dan mengambil keuntungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, secara material maupun secara fisik.

Bahan-bahan ajar yang didapatkan dari lingkungan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat dipelajari serta dianalisa, selanjutnya menulis rencana dan proposal untuk memperbaiki situasi setempat.

Tujuan kelompok belajar keaksaraan fungsional adalah membantu warga belajar mencari dan menggunakan bahan "calistung" (Baca, Tulis, dan Hitung) sendiri. Karena itu, tutor tidak hanya membantu warga belajar membaca buku, tetapi tutor juga membantu mereka pergi ke TBM (Taman Bacaan Masyarakat).

Strategi Pendidikan dan Pengembangan Program Keaksaraan Fungsional

1. Pendekatan

Keaksaraan Fungsional merupakan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati dan berdiskusi yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari berdasarkan konteks lokal.

Dalam kaitannya dengan konteks lokal tersebut, bahan-bahan materi ajar yang digunakan didapatkan dari lingkungan mereka sendiri, baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat dipelajari serta dianalisa, selanjutnya menulis rencana dan proposal untuk memperbaiki situasi sesuai dengan kebutuhan warga belajar setempat.

Dalam penyelenggaraan program pembelajaran keaksaraan fungsional ini dapat dilakukan dalam

bentuk kelompok belajar. Tujuan kelompok belajar keaksaraan fungsional (Kejar KF) adalah membantu warga belajar mencari dan menggunakan bahan “calistung” (Baca, Tulis, dan Hitung) sendiri. Karena itu, tutor tidak hanya membantu warga belajar membaca buku, tetapi tutor juga membantu mereka pergi ke TBM (Taman Bacaan Masyarakat).

Tutor tidak hanya membantu warga belajar membaca informasi tentang bagaimana memperoleh dana, tutor juga membantu mereka pergi ke koperasi atau bank untuk mencari informasi dan formulir atau membantu warga belajar membuka rekening. Tutor juga meminta nara sumber dari instansi lain untuk membantu warga belajar.

Selain kelompok belajar, warga belajar dapat dibelajarkan dengan membentuk kelompok Usaha Bersama (UB). Pembentukan kelompok ini merupakan suatu kesepakatan antara Tutor, Pengelola PKBM dan Warga Belajar dalam menciptakan suatu usaha dari keterampilan yang telah dipelajari selama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dikelola bersama-sama untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup semua pihak yang terlibat di dalam UB tersebut. Jadi, dengan cara-cara seperti inilah ada kebermaknaan dan kebermanfaatannya pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) bagi warga belajar KF yang berkembang pada masyarakat yang notabene hidup dalam garis ekonomi rendah (miskin). Keaksaraan pada masyarakat miskin adalah :

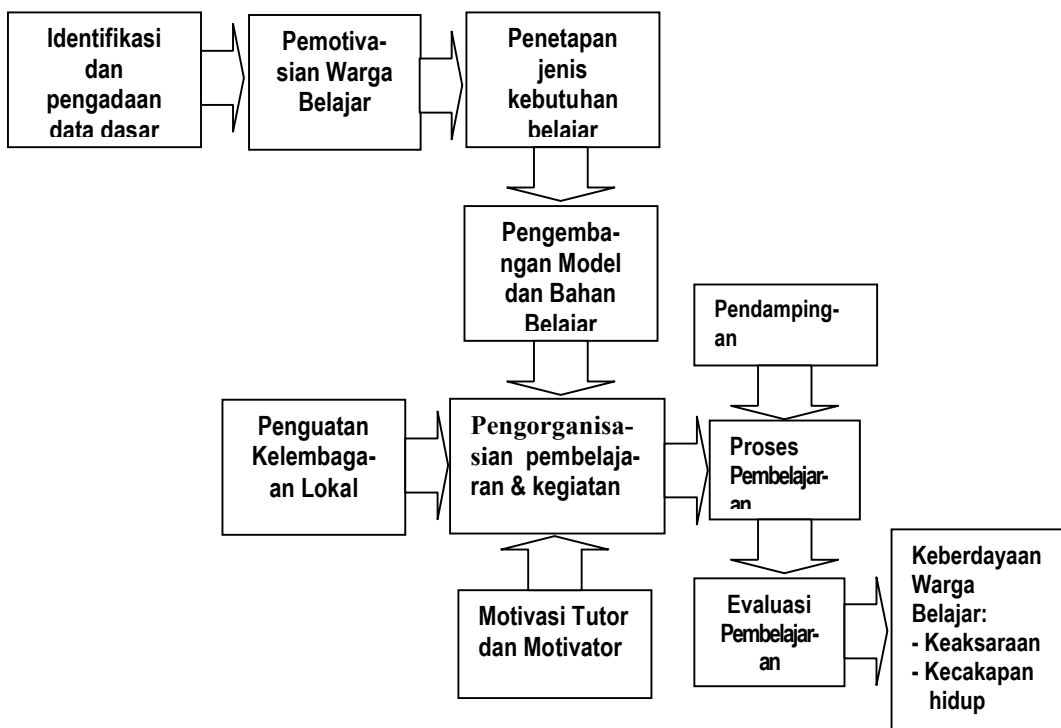
- a. Ketidapahaman mereka tentang pentingnya pendidikan untuk meningkatkan taraf hidupnya
- b. Penyelenggaraan program keaksaraan tidak luput mengalami kesulitan untuk menarik perhatian dan melibatkan mereka, terutama orang dewasa dalam proses pembelajaran.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan model program pembelajaran keaksaraan fungsional adalah Action Reserch dan prinsip-prinsip pembelajaran partisipatif. Dalam konteks pendidikan sepanjang hayat (*life long education*), tanggung jawab program keaksaraan fungsional tidak terhenti setelah program dinyatakan berakhir, namun harus sampai pada dampak pembelajaran bagi kehidupan mereka secara terus menerus sepanjang hidupnya.

2. Alur Kegiatan Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional

Penyelenggaraan program aksi diarahkan untuk memungkinkan warga masyarakat dapat terlibat sejak awal baik pada sisi proses kegiatan maupun dalam pengambilan keputusan yang diperlukan pada setiap tahapan. Hal ini dilakukan sebagai prosedur kerja bagi penyelenggara dalam pengelolaan program juga sebagai medium pembelajaran bagi masyarakat dalam pengembangan kapasitas.

Alur kegiatan penyelenggaraan program keaksaraan fungsional tersebut, dapat dilakukan seperti bagan berikut:



Gambar 1. Bagan Model Penyelenggaraan Program

Keterangan:

1. Berdasarkan gambaran di atas, langkah pertama yang dilakukan Tim Pengembang adalah melakukan identifikasi untuk memperoleh gambaran komprehensif terhadap calon kelompok sasaran;
2. Melakukan motivasi kepada kelompok sasaran mengenai perlunya meningkatkan kecakapan keaksaraan sebagai pintu masuk bagi upaya pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Pada saat ini perlu dilakukan pula koordinasi dan penggerakan tokoh-tokoh masyarakat lokal dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk berperan serta dalam kegiatan ini;
3. Tim Pengembang bersama-sama dengan calon tutor dan warga belajar untuk menetapkan jenis kegiatan dan tema-tema belajar yang akan dibelajarkan;
4. Tim Pengembang mengembangkan draft model keaksaraan yang terintegrasi dengan vocational skill (life skills)
5. Melakukan penguatan kelembagaan lokal, baik pengurus Rukun Warga, Rukun Tetangga, Lembaga Keagamaan, Organisasi Kepemudaan dan tokoh-tokoh masyarakat.
6. Melakukan pengorganisasian pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan rencana kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.
7. Tim pengembang melakukan orientasi tenaga lapangan dan fasilitator/tutor. Materi orientasi yang disampaikan berkenaan dengan konsep dan implementasi keaksaraan, metodologi pembelajaran, pengembangan media belajar

- bersumber sumber daya lokal, evaluasi pembelajaran dan kiat-kiat melakukan motivasi warga belajar;
8. Proses pembelajaran dan pemberdayaan warga belajar dengan melibatkan berbagai sumber belajar. Tim pengembang dari BPKB- bersama-sama dengan Tutor, Pamong Belajar dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan/atau TLD melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi (formatif dan diagnostik) agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif, serta mengatasi berbagai hambatan yang terjadi.
 9. Melakukan evaluasi program atau evaluasi sumatif, yaitu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian program keaksaraan yang dilakukan. Aspek yang dievaluasi antara lain berkenaan dengan kemampuan kecakapan keaksaraan, kecakapan vocational, kecakapan sosial-ekonomi, kecakapan diri dan kepercayaan diri.
 10. Hasil evaluasi inilah yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberdayaan warga belajar, baik kecakapan keaksaraan, kecakapan vocational, kecakapan sosial-ekonomi, kecakapan diri dan kepercayaan diri.

Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam perencanaan program keaksaraan adalah konteks sosial lokal. Jalal *et.al.* (2005:192-194) menekankan pada pentingnya memperhatikan konteks sosial lokal dan dalam perancangan program diperlukan desain lokal, yang selanjutnya dalam

rancangan tersebut unsur utamanya terdiri atas (a) kelompok sasaran, (b) tujuan, (c) kegiatan belajar, (d) waktu dan tempat pembelajaran dan (e) hal lain yang terkait yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok belajar. Konteks sosial lokal yang perlu diperhatikan adalah bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi sosial calon warga belajar. Salah satu bentuk penterjemahan konteks sosial lokal dalam wujud bahasa adalah bahasa ibu (*mother tongue*). Bahasa ibu dipergunakan untuk meng-ekspresikan dan menerima informasi dalam kegiatan komunikasi sosial.

D. Penutup

Pendidikan pada dasarnya diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang melingkupinya. Memberaksarkan penduduk atau warga belajar dari kebutaaksaraan agar dapat membaca dunia kehidupannya dan merupakalah satu dari sekian banyak cara untuk membantu manusia mengingat, mencatat, dan berkomunikasi lintas ruang dan waktu yang dibutuhkan setiap anggota warga masyarakat seiring dengan perubahan dan perkembangan dunia yang semakin cepat.

Tiga kategori dasar tentang definisi keaksaraan, didasari oleh asumsi yang sangat berbeda dari peran keaksaraan dalam kehidupan masyarakat, yaitu: (1) keaksaraan merupakan seperangkat keterampilan

dan kemampuan atau kompetensi dasar; (2) keaksaraan sebagai dasar yang penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik); dan (3) keaksaraan merupakan refleksi dari kebijakan dan kenyataan struktural.

Pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar. Bagi penduduk atau kelompok masyarakat miskin, pembelajaran KF akan lebih bermakna jika penyusunan program dan bahan/materi pembelajarannya dilandasi kebutuhan warga belajar yang lebih dikaitkan dengan ekonomi yang tujuan adalah untuk membantu pihak penerima (warga belajar) mampu berfungsi dalam kehidupan ekonomi.

Bahan-bahan ajar yang didapatkan dari lingkungan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (kelompok belajar) dapat dipelajari serta dianalisa, selanjutnya menulis rencana untuk memperbaiki situasi setempat. Tujuan kelompok belajar keaksaraan fungsional (KF) adalah membantu warga belajar mencari dan menggunakan bahan "CaLisTung" (Baca, Tulis, dan Hitung) sendiri. Tutor tidak hanya membantu warga belajar membaca buku, tetapi tutor juga membantu mereka pergi ke TBM (Taman Bacaan Masyarakat).

Daftar Bacaan

- APPEAL. (1996). *Pendidikan Berkelanjutan: Arah dan Kebijakan Baru*, Bangkok: Ditjen Dikluspora dan UNESCO.
- (1999). *Pendidikan Dasar untuk Pemberdayaan Orang Miskin (Laporan Studi Kawasan tentang Keaksaraan sebagai Alat Pemberdayaan Orang Miskin)*, Bangkok: UNESCO.
- Archer, David, and Cottingham, Sara. (1996). *Reflect Mother Manual, a Ne Approach to Adult Literacy*, London: Actionaid.
- Arif, Z. (1997). *Pendidikan Luar Sekolah Menyongsong Awal Abad Ke-2 : Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Ditjen Diklusepora.
- (2000), *Andragogi*, Bandung: Angkasa.
- Coombs, P dan Manzoor A. (1984). *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non Formal*, Jakarta: Rajawali.
- Jalal, F. Et.al. (2005) *Pendidikan Keaksaraan: Filosofi, Strategi dan Implementasi* Jakarta: Dirjen PLS
- Kindervatter, S. (1979). *NonFormal Education: As An Empowering Process*. Amherst Mass: Center for international Education University Of Massachusetts: Printers in

- The United States of America
- Sakya, T.M. (1986) "Orientation on Neo-Literate Materials and Process of Workshop" *makalah* untuk 4th Regional Workshop on Literacy Follow Up Materials in Asia and the Pacific, Bandung: ACCU, UNESCO Regional Office for Education in Asia and the Pacific, Direktorat Jenderal PLSPO Depdikbud
- Srinivasan, L (1977). *Perspektif on Nonformal Adult Learning: Functional Education for individual, Community and National Development*, New York: World Education.
- Sudjana, D (2001). *Pendidikan Luar Sekolah: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung Azas*, Bandung: Falah Production.
- (2000). *Manajemen Program Pendidikan: untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Falah Production
- UNESCO (1993) *Post-Literacy Programmes* Bangkok: UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific
- (1993), *Continuing Education: New Policies and Directions*. Bangkok: UNESCO Principal Regional Office for Asia and the Pacific
- (1996). *Pendidikan Berkelanjutan: Arah dan Kebijakan Baru*, Ditjen Diklusepora dan UNESCO PROAP: Bangkok.
- (1996). *Program Berorientasi Masa Depan*, Ditjen Diklusepora dan UNESCO PROAP: Bangkok.
- (1991). *Training Materials for Literacy Personnel*. APPEAL UNESCO: Bangkok.